

Community Development Pasca HUT Kota Padang ke-349

Oleh: Fachrur Rozi

Publikasi Pada Koran Haluan, 13 Agustus 2018

7 Agustus adalah tanggal yang telah ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Padang. Penetapan hari jadi Kota Padang ini, diputuskan melalui Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 188.45.22 Tahun 1986, berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD Kota Padang tanggal 31 Juli 1986 silam.

Beberapa hari yang lalu Kota Padang telah memperingati hari jadinya. Tepat pada tanggal 7 agustus 2018 Kota Padang telah berusia 349 tahun. Berdasarkan pernyataan dari Ketua DPRD Kota Padang, tujuan dari peringatan hari jadi Kota Padang ini, dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengisinya dengan kemajuan pertumbuhan yang signifikan. Kemudian memperkuat sinergisitas Walikota dengan DPRD dalam membangun kemajuan Kota Padang yang lebih baik lagi.

Hal positif yang bisa kita ambil dari peringatan hari jadi Kota Padang ini adalah munculnya komitmen bersama dari lembaga eksekutif dan legislatif untuk bergandengan tangan membangun Kota Padang yang lebih baik. Sinergisitas antar lembaga pemerintahan merupakan salah satu modal dalam proses pembangunan. Namun, proses pembangunan di era-modern tidak lagi hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Terdapat pihak lain yang mesti dirangkul untuk menngoptimalkan pembangunan yang akan dilakukan. Apalagi tujuan yang hendak dicapai adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses pembangunan masyarakat (*community development*) sesungguhnya tidak hanya melibatkan unsur pemerintah saja tetapi peran dari unsur masyarakat juga dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional (Pasal 2 Ayat 1).

Pembangunan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta aktif anggota masyarakat dapat memperoleh hasil yang efektif dan produktif, atau dapat dikatakan tercapainya kinerja pembangunan yang lebih tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu unsur keberhasilan pembangunan dan merupakan salah satu kekuatan pembentukan (*formative power*) pertumbuhan daerah. Karena menerapkan prinsip demokrasi pembangunan yang berasaskan pada pembangunan yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Pembangunan Hari Ini dan Untuk Masa Depan

Sampai saat ini, kemajuan pembangunan Kota Padang dianggap telah baik. Indikator yang digunakan dalam mengukur kemajuan pembangunan Kota Padang ini, salah satunya adalah realisasi dari 10 program unggulan yang ditetapkan oleh pemerintah. Capaian 10 program unggulan merupakan program turunan dari 10 prioritas pembangunan Kota Padang untuk periode 2014-2019 yang sudah mencapai 85,5% sampai akhir tahun 2017.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembangunan memiliki sifat yang multidimensional. Artinya untuk mengukur keberhasilan pembangunan itu, dapat menggunakan berbagai perspektif dan indikator. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Apabila klaim keberhasilan dari realisasi 10 program unggulan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang itu bisa dikatakan telah menuju kearah terciptanya kesejahteraan masyarakat, maka kita perlu melakukan telah lebih jauh lagi.

Secara konvensional istilah pembangunan sering diartikan sebagai perubahan menuju kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Pada dasarnya kehidupan yang lebih baik itu meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan pangan yang cukup, tempat tinggal yang memadai, layanan yang dapat diakses dengan mudah dan diperlakukan dengan terhormat serta bermartabat. Menurut Jim Ife (2009) pembangunan masyarakat (*community development*) memiliki enam dimensi yang saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Keenam dimensi ini adalah *Social development*, *Economic development*, *Political development*, *Cultural development*, *Environmental development*, *Spiritual development*.

Mari kita telaah, apakah pembangunan kota padang saat ini sudah mencukupi enam dimensi *community development* itu. Pertama *Social development* bisa dilihat dari beberapa kegiatan seperti kegiatan pelayanan sosial yang menyangkut isu-isu yang muncul. Misalnya penyediaan fasilitas rekreasi/olahraga, isu kenakalan remaja dan lain-lain. Adanya Pusat kegiatan masyarakat yaitu pengembangan sarana, kegiatan dan organisasi untuk interaksi sosial. Pada aspek ini, Kota Padang sudah melakukan upaya pembangunan objek wisata baru yang dapat menarik para wisatawan seperti di Tugu Perdamaian dan IORA. Pemerintah Kota Padang juga memberikan santunan kematian, merenovasi rumah tidak layak huni yang sudah mencapai 70% dari target 5000 rumah. Di bidang Pelayanan transportasi, Pemerintah Kota Padang juga telah melakukan peningkatan layanan Trans Padang, e-tiketing serta pembangunan sarana prasarana penunjang lainnya.

Dimensi kedua yaitu *Economic development*. Pembangunan ekonomi dalam konsep pembangunan masyarakat (*community development*), merupakan pandangan alternatif terhadap ekonomi global yang didominasi oleh industri besar (kapitalistik). Oleh karena

itu, gagasan utamanya adalah pengembangan ekonomi masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakatnya sendiri. Pembangunan pada aspek ini telah diupayakan oleh Kota Padang dengan menciptakan 10.000 wirausahawan baru dengan usaha mikro kecil menengah diseluruh kecamatan. Kemudian Pemerintah Kota Padang juga melakukan pembangunan pasar raya dan pasar inpres sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ketiga yaitu *Political development*. Dimensi ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat secara keseluruhan di dalam arena politik yang lebih luas, serta mengembangkan kemampuan individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berperanserta dalam politik dan berperan aktif dalam sistem demokrasi. Di titik ini, kita agak sulit mengatakan bahwa Pemko Padang sudah melakukan hal ini. Karena sulit menemukan program mana yang telah dilaksanakan yang menggambarkan dimensi ini.

Dimensi keempat *Cultural development*. Pengembangan kebudayaan adalah bagian yang penting dalam pembangunan masyarakat (*community development*), tujuannya untuk menumbuhkan sikap kritis terhadap identitas budaya, menghargai dan bangga pada identitasnya sendiri, menghargai keberagaman budaya dan dapat hidup berdampingan dalam perbedaan (keberagaman). Di dalam 10 program unggulan, memang terdapat upaya penyelenggaraan seni budaya. Namun, untuk realisasinya perlu dilakukan peningkatan agar dimensi ini betul-betul dapat terpenuhi.

Kelima *Environmental development*. Dimensi ini merupakan upaya untuk memperbaiki lingkungan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengembangan lingkungan memerlukan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami hubungan lingkungan dengan kehidupan masyarakat/manusia, baik dalam perspektif lokal, maupun global dengan menggunakan prinsip keberlanjutan. Setidaknya Pemerintah Kota Padang telah berusaha mengupayakan dimensi pembangunan ini di sektor sanitasi yang didukung dengan pemberlakuan Perda Nomor 21 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Pemko Padang telah menggerakkan semua elemen masyarakat untuk peduli kebersihan dalam rangka mewujudkan Padang Bersih. Kemudian Pemko Padang juga melakukan pembenahan sungai dan drainase sebagai upaya untuk mencegah terjadinya banjir.

Dimensi yang terakhir yaitu *Spiritual development*. Untuk bisa memenuhi dimensi ini diperlukan komitmen yang tinggi dari penyelenggara kebijakan. Hal ini dikarenakan untuk bisa mengidentifikasi dimensi ini tidak cukup hanya diukur dengan kegiatan yang sifatnya materil, misalnya pembangunan 500 Ruang kelas baru di sekolah-sekolah. Untuk kegiatan pesantren ramadhan dan kegiatan keagamaan juga diperlukan konsistensi dan evaluasi pada setiap pelaksanaannya agar tujuan dari program dapat tercapai.

Maka dari itu, untuk memaksimal *community development* Kota padang kedepannya, diperlukan kolaborasi terpadu antara lembaga baik itu di pemerintahan, masyarakat maupun pihak swasta. Tidak hanya itu pembangunan yang dilakukan juga jangan hanya berfokus pada pembangunan yang bersifat fisik. Tetapi perlu difokuskan pada pembangunan non-fisik agar dimensi dari *community development* dapat tercapai, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.